

BAB II PERSPEKTIF PENDIDIKAN POLITIK

Untuk lebih mendalami hakekat pendidikan politik, berikut ini disajikan lagi beberapa pendapat ahli mengenai pendidikan politik.

Alfian (1986) menyatakan pendidikan politik diartikan sebagai usaha sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat sehingga mereka memahami dan menghayati benar nilai-nilai yang terkandung dalam suatu sistem politik ideal yang hendak dibangun. Endang Sumantri (2003) menyatakan pendidikan politik merupakan proses penurunan nilai-nilai dan norma dasar dari ideologi suatu negara yang dilakukan secara sadar, terorganisir, berencana dan berlangsung kontinu dari satu generasi ke generasi berikutnya dalam rangka pembangunan watak bangsa. Sunatra (2006) menyatakan pendidikan politik pada hakekatnya merupakan esensi dari pembangunan budaya politik yang berlangsung secara sistematis dan berkesinambungan seiring dari perjalanan hidup sistem politik. Berdasar pendapat di atas, faktor apa saja yang mempengaruhi adanya pendidikan politik?

Perspektif pendidikan politik merupakan cara pandang terhadap suatu persoalan, dalam hal ini pendidikan politik. Dalam pendidikan politik, perspektif berguna untuk menempatkan materi secara proporsional dan tepat dalam rangka membangun kesadaran kritis, pengetahuan dan kecakapan warga negara sehingga bisa memahami persoalan politik yang dihadapi dan selanjutnya mampu berpartisipasi secara cerdas dan bertanggung jawab.

Dengan demikian dalam pendidikan politik, perlu melihat persoalan atau fakta di sekitar kita yang dapat mempengaruhinya. Persoalan itu bisa dirangkum menjadi 4 macam (Nur Khoiron, 1999), sebagai berikut; **gejala global, pudarnya ikatan kebangsaan sehingga berpotensi disintegrasi, adanya ledakan partisipasi politik dan kebangkitan agama yang sarat kepentingan politik.**

Berdasar hal ini, maka ada 4 (empat) wacana kontekstual yang dapat mempengaruhi pendidikan politik. Wacana tersebut adalah

- ✓ Wacana geopolitik internasional akibat pengaruh global
- ✓ Wacana pendiri bangsa sebagai akibat dari pudarnya ikatan kebangsaan
- ✓ Wacana demokrasi partisipatoris sebagai akibat gagalnya demokrasi representatif dan ledakan partisipasi
- ✓ Wacana agama sebagai akibat adanya politisasi agama yang sarat kepentingan

A. Perspektif yang mempengaruhi pendidikan politik

1. Wacana geopolitik internasional
 - a. Menyadarkan makna penting hidup bersama dalam ikatan kebangsaan
 - b. Menyatukan tujuan, visi misi kita dalam melangsungkan hidup bersama
2. Wacana pendiri bangsa
 - a. Wacana pendirian bangsa yang pernah dilakukan *the founding fathers* mempunyai makna sejarah yang penting

- b. Perspektif geopolitik harus menjadi dasar bagi pengembangan wawasan kebangsaan
 - c. Wawasan kebangsaan harus dibangun bersifat dua arah : inward looking dan out ward looking
 - d. Pendidikan politik dalam rangka menegakkan demokrasi dan mencegah integrasi dapat diberangkatkan dari perspektif wacana pendiri bangsa
3. Wacana demokrasi partisipatoris
Demokrasi langsung partisipatoris penting untuk disosialisasikan sebagai wacana sekaligus praksis politik dalam kehidupan bernegara
4. Wacana agama
Bermaksud menghadirkan kesadaran kritis dengan memperhatikan agama sebagai faktor komplementer dalam kehidupan bernegara
Meskipun agama mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan yang luhur namun dapat saja digunakan sebagai sarana legitimasi yang efektif untuk kepentingan suatu kekuasaan.
Keempat wacana tersebut memunculkan beragam problem aktual dan isu strategis yang bisa mempengaruhi isi materi pendidikan politik.

B. Aktor Pendidikan Politik

Aktor adalah pelaku pendidikan politik. Aktor pendidikan politik antara lain; partai politik, keluarga, masyarakat sipil, dan kelompok kepentingan (Nur Khoiron, 1999). Menurut Permendagri No 36 Tahun 2010, pelaku pendidikan politik adalah

- a. partai politik;
- b. partai politik lokal;
- c. organisasi kemasyarakatan;
- d. lembaga nirlaba lainnya; dan
- e. lembaga atau instansi vertikal di daerah.

Yang dimaksud organisasi nir laba itu, mencakup:

- a. badan eksekutif mahasiswa;
- b. dharma wanita;
- c. pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
- d. pondok pesantren;
- e. paguyuban atau sejenisnya;
- f. rukun tetangga;
- g. rukun warga;
- h. karang taruna; dan
- i. kelompok swadaya masyarakat lainnya

Kembangkanlah masing-masing perspektif tersebut !

Temu tunjukkan pelaku pendidikan politik dalam praktek pendidikan politik!

BAB III

ISI PENDIDIKAN POLITIK

Isi pendidikan politik membicarakan bahan atau materi apa saja dari pendidikan politik itu. Apabila dinyatakan pendidikan politik bertujuan mengembangkan pengetahuan, kesadaran dan ketrampilan warga negara dalam politik, maka materinya meliputi aspek kognitif, afektif dan psikomotorik.

Aspek pendidikan politik ini hampir sama dengan konsep *civic knowledge*, *civic disposition* dan *civic skill* dalam dimensi *civic education*. Civic education dalam pengertian luas (*citizenship education*) pada dasarnya juga merupakan *political education*

A. Isi pendidikan politik yang mencakup aspek kognitif

Salah satu tujuan pendidikan politik adalah membangun pengetahuan politik warga negara (*civic knowledge*). Setidaknya ada 5 persoalan pokok yang perlu diketahui warga negara. Kelima persoalan itu adalah :

1. Demokrasi dan hak-hak warga negara
2. Kedaulatan rakyat
3. Sistem kelembagaan negara
4. Hubungan kekuasaan pusat dan daerah
5. Sistem ekonomi

Materi di atas perlu dijawab dan dikembangkan secara kritis dari berbagai sudut pandang, termasuk keempat wacana perspektif pendidikan politik. Adapun langkah yang ditempuh untuk memahami persoalan tersebut adalah

1. Definisikan konsep tersebut menurut makna dasarnya atau menurut pendapat/pemikiran
2. Bandingkan uraian dari aneka pemikiran tersebut
3. Definisikan dengan pemahaman bebas sesuai pengalaman aktual partisipan
4. Bangun pemahaman baru berdasar perspektif yang telah ditawarkan

B. Isi pendidikan politik yang mencakup aspek afektif

Pendidikan politik mencakup didalamnya proses menanamkan nilai-nilai tertentu kepada warga negara. Dengan demikian pendidikan politik bertujuan membangun karakter warga negara, sebagai dimensi afektif dari pendidikan politik. Dalam pendidikan politik warga negara, nilai-nilai yang diajarkan adalah nilai-nilai demokrasi.

Nilai-nilai tersebut adalah

- a. Kebebasan
- b. Tanggung jawab
- c. Kemandirian
- d. Hak menentukan nasib sendiri
- e. Toleransi

- f. Pertolongan agar bisa menolong diri sendiri
- g. Pluralisme
- h. Kemajuan
- i. Perdamaian

Selain nilai-nilai demokrasi, pendidikan politik bertujuan pula membangun karakter yang berpihak. Karakter warga negara ini sesungguhnya juga merupakan pencerminan dari nilai-nilai demokrasi .

Karakter tersebut antara lain;

- a. Rasa hormat dan tanggung jawab
- b. Bersikap kritis
- c. Membuka diskusi –dialog
- d. Bersikap terbuka
- e. Rasional
- f. Jujur
- g. Adil

C. Isi pendidikan politik yang mencakup aspek psikomotor

Aspek psikomotorik berkenaan dengan tujuan pendidikan politik untuk membangun kecakapan warga negara . kecakapan itu meliputi kecakapan intelektual dan kecakapan partisipatoris.

Kecakapan intelektual adalah kecakapan berfikir kritis. Untuk mampu berfikir kritis mensyaratkan adanya kesadaran kritis warga negara. Kecakapan intelektual meliputi:

1. Kemampuan mendengar
2. Kemampuan mengidentifikasi dan mendeskripsikan persoalan
3. Kemampuan menganalisis
4. Kemampuan mengadakan evaluasi

Kecakapan partisipasi meliputi kemampuan interaksi (interacting), monitoring (monitoring), dan mempengaruhi (influencing).

Isi pendidikan politik atau bahan pendidikan politik yang harus disosialisasikan menurut Inpres No 12 Tahun 1982 tentang Pendidikan Politik Bagi Generasi Muda, mencakup:

1. Penanaman kesadaran berbangsa dan bernegara
2. Kehidupan dan kerukunan hidup umat beragama
3. Motivasi berprestasi
4. Hak dan kewajiban, keadilan sosial, harkat dan martabat manusia
5. Pengembangan kemampuan politik dan pribadi untuk mewujudkan kebutuhan dan keinginan ikut serta dalam politik
6. Disiplin pribadi, sosial dan nasional
7. Kepercayaan pada pemerintah
8. Kepercayaan kepada pembangunan yang berkelanjutan

Sedangkan isi pendidikan politik atau disebut materi pendidikan politik menurut Permendagri No 36 Tahun 2010, meliputi **materi wajib dan materi pilihan**. Materi wajib adalah Pancasila dan UUD 1945.

Sedangkan materi pilihan mencakup:

- a. demokrasi;
- b. hak asasi manusia;
- c. sistem pemerintahan;
- d. pertahanan dan keamanan;
- e. budaya dan etika politik;
- f. kebijakan publik;
- g. pendidikan kewarganegaraan;
- h. politik kesejahteraan sosial;
- i. politik tata ruang dan lingkungan;
- j. pemerintahan yang baik;
- k. globalisasi dan politik luar negeri Indonesia;
- l. partai politik;
- m. otonomi daerah;
- n. masyarakat sipil; dan
- o. pasar dan dunia usaha

Acuan normatif yang digunakan adalah bahwa

- (1) Materi pilihan sebagaimana dimaksud tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Materi pendidikan politik sebagaimana dimaksud difasilitasi sesuai dengan kebutuhan, ketersediaan, prosedur, dan ketentuan yang berlaku

Analisis dan kembangkan isi pendidikan politik di Indonesia tersebut berdasar tiga aspek : kognitif, afektif dan psikomotorik !